

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan individu tentu menghadapi gejala atau fenomena yang terwujud dalam realitas kehidupan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial yang artinya dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain. Tentunya dalam aktivitas sosial tersebut dapat menimbulkan masalah sosial. Pada dasarnya masalah sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Karena masalah sosial muncul dari hubungan antara budaya manusia itu sendiri dan orang lain. Masalah sosial (*problema sosial*) adalah permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat, bersifat sosial dan berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Jadi pada dasarnya masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. (Soerjono Soekanto,2019)

Masalah sosial tidak akan mungkin dibahas tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk, setidaknya terdapat empat elemen penting yang dapat menjadi pertimbangan suatu situasi yang dapat dianggap sebagai masalah sosial yaitu dapat berdampak dengan menghadirkan berbagai kerugian baik terhadap keadaan fisik dan mental baik individu atau pada masyarakat, merupakan pelanggaran terhadap satu atau beberapa nilai atau standar yang mempunyai oleh sebagian besar masyarakat atau mereka yang mempunyai kekuatan pengaruh di masyarakat,

keadaan yang terus menerus terjadi, dan memunculkan kebutuhan untuk dipecahkan berdasarkan evaluasi dari berbagai kelompok di masyarakat.

Kemiskinan menjadi masalah sosial karena ketika kemiskinan mulai mewabah atau bertambah banyak maka angka kriminalitas kemiskinan sebagai pangkal penyebab masalah sosial dan ekonomi. Kemiskinan menjadi masalah sosial ketika stratifikasi dalam masyarakat menciptakan tingkatan atau garis-garis pembatas. Situasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai perlu diatasi (dipecahkan). Dalam pandangan pekerja sosial kemiskinan menyebabkan terganggunya fungsi sosial, sehingga mempengaruhi kemampuan memenuhi kebutuhan, dan peranan-peranannya di masyarakat.

Pekerjaan sosial menurut Charles Zastrow merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan. Pekerjaan sosial tidak terlepas dari Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial sendiri adalah suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Undang-Undang No 11 Tahun 2009). Kondisi Sejahtera menurut Well Being Midgley (1995:14) adalah Masalah sosial dapat dikelola, Sejahtera kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dan kesempatan untuk mengembangkan diri disediakan ataupun di fasilitasi oleh pemerintah.

Terdapat konsepsi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dalam kesejahteraan sosial yaitu seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Menurut permensos 08 Tahun 2012 ada 22 kategori PMKS menurut yaitu, anak balita terlantar, anak terlantar, anak nakal, anak jalanan, wanita Rentan Miskin, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, tuna susila, pengemis, gelandangan, Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK), korban penyalahgunaan narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, keluarga fakir miskin, keluarga berumah tak layak huni, keluarga bermasalah sosial psikologis, komunitas adat terpencil, korban bencana alam, korban bencana sosial atau pengungsi, pekerja migran bermasalah sosial, Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) dan keluarga rentan.

Salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah perempuan Rentan Miskin yang berada dalam masalah kemiskinan. Ihroni (1995: 268) mengemukakan pendapat bahwa:

“Perempuan dalam keluarga berpenghasilan rendah memiliki potensi terbatas untuk meningkatkan derajat kesehatan diri dan keluarganya, disebabkan kemiskinan sering menyita waktunya untuk mencari penghasilan tambahan yang mengalami kesulitan karena Pendidikan terbatas dan situasi semakin memburuk bila perempuan itu kepala keluarga”

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan peran ganda yang dijalani oleh perempuan Rentan Miskin merupakan kewajiban agar dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam menjalankan peran ganda tersebut, mereka harus mampu mengatur waktu antara pekerjaan dan mengurus anak-anak sehingga dapat meminimalisir terganggunya salah satu peranan lain yang dapat memunculkan konflik. Perempuan Rentan Miskin memaknai segala bentuk kerja kerasnya ditunjukkan agar dapat memberikan kebahagiaan kepada anak-anaknya. Perempuan Rentan Miskin juga membutuhkan pemberdayaan agar dapat meningkatkan kesejahtraannya. Tentunya perlu adanya upaya untuk meningkatkan keterampilan dan peningkatan kapasitas bagi perempuan Rentan Miskin, salah satunya memberikan pemberdayaan. Pemberdayaan perempuan Rentan Miskin merupakan pemberian kemampuan kepada PRSE agar dapat lebih berdaya melalui keterlibatan potensi yang ada di luar dirinya, dengan peningkatan pemahaman dan implementasi bimbingan inovasi. Marwanti & Astuti (2011) Mengemukakan bahwa:

“Dalam sebuah keluarga miskin, perempuan senantiasa sebagai katup penyelamat bagi perekonomian keluarga. Perempuan dianggap sebagai katup penyelamat bagi perekonomian keluarga dikarenakan oleh berbagai peran perempuan miskin yang diambil dalam keluarga”.

Seiring perkembangan ilmu dan zaman pemberdayaan pun lebih memiliki kreativitas yang tinggi dan pendekatan yang beragam. Salah satunya pekerjaan sosial yang menjadikan pemberdayaan sebagai salah satu metode untuk menjalankan intervensi dengan fokus utamanya yaitu mengembalikan keberfungsian sosial dari individu, keluarga komunitas dan masyarakat.

Pemberdayaan dalam perspektif kesejahteraan sosial menghubungkan antara masalah, potensi, kebutuhan dan sumber untuk menemukan solusi, selain itu pemberdayaan juga harus berprinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan / kemandirian, dan keberlanjutan.

Sumber merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan suatu masalah. Dari definisi tersebut, maka pengertian sumber kesejahteraan sosial adalah sumber atau potensi yang dapat digunakan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial atau Praktek Pekerjaan Sosial. Sistem sumber yang dapat digunakan oleh seseorang, kelompok dan masyarakat berdasarkan pendapat Max Siporin D.S.W (1975:22). yaitu :

“A resource any valuable thing, or reserve or at hand, that one can mobilie and put to instrumental use in order to function, meet a need resolve a problem”

Sumber daya adalah segala sesuatu yang berharga, atau cadangan atau tersedia, yang dapat dimobilisasi dan digunakan secara instrumental agar dapat berfungsi, memenuhi kebutuhan, menyelesaikan masalah”

Usaha mewujudkan kondisi kesejahteraan sosial telah menjadi kesepakatan global, dengan orientasi pembangunan ditunjukkan oleh adanya kesepakatan global yang disebut SDG's. Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

Wahyuningsih (2018) mengemukakan:

“Perwujudan pembangunan berkelanjutan merupakan suatu hal yang membutuhkan kontribusi segala pihak. Masyarakat sipil, pelaku usaha, hingga pemerintah memiliki perannya masing-masing. Laki-laki ataupun

perempuan tetap memiliki porsi dalam berkontribusi mewujudkan pembangunan berkelanjutan”.

Kenyataan yang dihadapi saat ini tidak menggambarkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Terlebih jika melihat hal tersebut dari segi gender. Berbagai stigma dan budaya menjadikan perempuan mendapatkan dampak buruk berkali lipat lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Seberapa besar peran perempuan dalam meningkatkan pembangunan menjadi tidak cukup bernilai. Memperlakukan perempuan dengan adil tidak hanya menyelesaikan ketidaksetaraan yang terjadi. Perempuan dapat menjadi kontributor utama dalam menyelesaikan masalah pembangunan berkelanjutan yang ada. Upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan akan bisa terakselerasi dengan menempatkan perempuan pada posisi yang sejajar dengan laki-laki. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya juga harus memperlakukan perempuan tanpa diskriminasi gender. Perempuan harus meningkatkan kualitas dan berani dalam mengambil peran. Lambat laun, pembangunan berkelanjutan bisa terwujud tanpa ada ketidaksetaraan gender yang terjadi.

Di Indonesia sendiri, keterlibatan dan peran NGO dalam implementasi sustainable development cukup besar. Implementasi sustainable development memang tidak mudah tetapi bukan berarti hal ini tidak dapat dicapai. Dalam hal ini keterlibatan NGO dalam berbagai program atau proyek yang mereka lakukan cukup banyak memberikan harapan untuk tercapainya sustainable development. (Abdurrahman,2003:3)

Banyak pihak di luar pemerintah yang mendukung dengan kesepakatan ini, salah satunya ditandai dengan banyak munculnya *Non Government Organization* atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengusahakan pembangunan atau pun

pemberdayaan. Pertumbuhan dan peran *Non Government Organization (NGO)* di Indonesia semakin berkembang seiring dengan menguatnya proses demokratisasi yang ditandai penguatan masyarakat sipil atau *civil society* dalam transformasi pembangunan. “Selama lima tahun terakhir lebih dari 10.000 *Non Government Organization (NGO)* yang bergerak di bidang budaya, sosial ekonomi, politik” (Nur R, 2013) .

Peran strategis *Non Government Organization (NGO)* ini dalam dasawarsa terakhir menghadapi hambatan ketika *Non Government Organization (NGO)* ingin mengimplementasikan perannya dalam proses demokratisasi yang dapat memberikan kontribusi pada transformasi politik. Salah satu Lembaga yang bergerak di bidang sosial adalah Lembaga Amil Zakat, yang mengembangkan usaha filantropi berbasis keagamaan, bergerak dengan menunaikan kewajiban salah satu rukun islam. Canda dan Furman melihat bahwa agama Islam telah melakukan reformasi sosial pada masanya dalam hal keadilan sosial, baik untuk kaum perempuan, anak-anak dan kelompok yang kurang diuntungkan. Hal ini antara lain tergambar dari pandangan mereka bahwa:

"Since the person and community should be wholly oriented toward the will of Allah, there is no separation between religious and secular spheres of life As Muhammad [peace be upon him] originally advocated for social reforms on behalf of women, children, and disadvantaged group, there is strong social justice value framework in Islam. Ideally, there should be a reciprocal relationship between individual freedom and community obligations and responsibilities. The Qur'an condemns exploitation of the poor, widows, other women, orphans, and slaves. It denounces economic abuse, such as false contracts, bribery, hoarding of wealth and usury" (Canda dan Furman, 1999)

Karena individu dan komunitas harus berorientasi meraih ridho Allah, maka tidak ada pemisahan antara kehidupan agama dan kehidupan dunia. Seperti Muhammad Saw. mengajarkan umat Muslim agar melakukan reformasi sosial berdasarkan kepentingan perempuan, anak-anak, dan

kelompok-kelompok yang kurang diuntungkan. Pada agama Islam terdapat penekanan yang sangat kuat pada kerangka nilai keadilan sosial. Secara ideal, seharusnya tercipta hubungan timbal balik yang saling melengkapi antara kebebasan individu dengan kewajiban dan tanggung jawab dari komunitas. Al Qur'an mengutuk tindakan eksploitasi pada orang miskin, janda-janda, kaum perempuan, yatim piatu, dan budak. Al Qur'an juga mencela penyalahgunaan 'kekuatan' ekonomi, seperti melakukan kontrak palsu, penyuapan, menumpuk-numpuk harta dan riba. (Canda dan Furman, 1999)

Kegiatan sosial dari kelompok keagamaan sudah berakar lebih jauh sebelum abad ke 16. Ada satu persamaan dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh kelompok keagamaan tersebut, yaitu adanya nilai kemanusiaan (humanitarianisme) yang dijunjung tinggi oleh masing-masing agama. Nilai-nilai humanitarianisme yang ada pada berbagai agama menurut merupakan titik awal perhatian dari kelompok yang mampu terhadap mereka yang kurang mampu dalam bidang keuangan. Kaitan dengan agama Islam persamaan yang tampak dari perhatian terhadap mereka usaha yang dilakukan oleh berbagai kelompok keagamaan yang berada di bawah garis adalah penghargaan yang tinggi kemiskinan telah dicontohkan terhadap nilai-nilai kemanusiaan oleh Nabi Muhammad Saw (humanitarianisme) dan para sahabatnya dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan membantu mereka yang tertindas dan membutuhkan pertolongan.

Di Indonesia pada awal abad ke-20, gerakan zakat KH Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah nya telah mencoba menjalankan ekonomi masyarakat serta mengentaskan kemiskinan. Sedangkan di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, gerakan seperti ini juga dapat dilihat pada gerakan KH Abdullah Gymnastiar dengan Daarut Tauhiidnya, yang mencoba mengentaskan kemiskinan yang ada di masyarakat sekitar. (Isbandi Rukminto, 2013)

Ketika terdapat tradisi zakat dikelola secara individual oleh umat Islam, banyak upaya untuk mengorganisasikan pengelolaan zakat secara terkoordinasi.

Singkatnya pada tahun 2014 dibentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam UU No 23 Tahun 2011 ini ditegaskan kewajiban LAZ untuk melakukan kegiatan penghimpunan dan pendayagunaan zakat.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, dan pendistribusian, pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilaksanakan dengan didasarkan jumlah asas, yaitu syariat islam, amanat (pengelolaan zakat harus dapat dipercaya), kemanfaatan (pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik), keadilan (pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya secara adil), kepastian hukum (dalam pengelolaannya zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki), terintegrasi (pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat), dan akuntabilitas (pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan di akses oleh masyarakat). (Susilawati, 2019)

Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli). DT Peduli adalah sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional dan merupakan Lembaga Nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan (*fundraising*) dan pendayagunaan dana zakat, Infaq dan Shadaqah sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid dengan tekad menjadi LAZ yang Amanah, Profesional dan Jujur berlandaskan pada Ukhuwah Islamiyah.

Hasil penghimpunan dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf tersebut digulirkan kepada penerima manfaat dalam bentuk program pelayanan dan pemberdayaan dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah dan sosial kemanusiaan. Prioritas utama saat ini adalah meningkatkan kekuatan ekonomi

bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan kemandirian masyarakat secara bersama-sama. Didirikan oleh KH. Abdullah Gymnastiar pada tanggal 16 Juni 1999 sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid dan bertekad untuk menjadi model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang amanah, profesional, akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata. Kiprah Daarut Tauhiid Peduli ini mendapat perhatian pemerintah, kemudian ditetapkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) sesuai dengan SK Menteri Agama no 257 tahun 2016 pada tanggal 11 Juni 2016.

Salah satu lembaga pemberdayaan yang dimiliki LAZNAS DT Peduli adalah Koperasi Pemberdayaan Ummat (KOPMU) Daarut Tauhiid (DT) merupakan lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi produktif yang berbadan hukum koperasi. Berawal dari Program (Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat) Misykat DT Peduli yang dibentuk pada 22 April 2003, pada tahun 2010 resmi berbadan koperasi. Walaupun berbentuk koperasi, setiap kegiatannya tetap mengacu pada Microfinance Syariah dan semangat awal pembentukan program, yaitu memberdayakan kaum ibu dari kalangan keluarga mustahik melalui kegiatan ekonomi, pendidikan, pelatihan dan pembinaan yang terstruktur dan berkesinambungan.

Konsep *microfinance* lahir sebagai antitesis dari pandangan konvensional di industri keuangan yang menghindari pembiayaan terhadap masyarakat miskin. *Microfinance* adalah cara alternatif bagi masyarakat miskin untuk mengakses keuangan yang relatif lebih terjangkau daripada perbankan

konvensional dan merupakan sumber utama pembiayaan bagi populasi dunia yang tidak punya akses kepada perbankan ataupun jasa keuangan.

Gerakan ini diperkenalkan oleh Muhammad Yunus melalui lembaga nonprofitnya, *Grameen Bank*. Dialah yang memprakarsai berdirinya *institusi microfinance* (MFI) setelah menyaksikan sendiri bahwa pinjaman kecil terhadap komunitas pengrajin mampu mendorong produktivitas yang lebih baik terhadap usaha kecil mereka sehingga mereka mampu melunasi utang dan di saat yang bersamaan mengelola usaha mereka secara independen dan bahkan berekspansi. Ketika pinjamannya dikembalikan, uang itu disalurkan kembali kepada orang lainnya yang membutuhkan, membuat lebih banyak orang keluar dari perangkap kemiskinan.

Pada intinya, program ini memberikan pinjaman kecil tanpa agunan kepada orang-orang di bawah garis kemiskinan untuk terlibat dalam proyek-proyek wirausaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Hal tersebut tidak dimaksudkan untuk mendanai kegiatan konsumtif pribadi, melainkan untuk memunculkan siklus pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan (Yunus, 2007)

Selain berupa dana, modal sosial sangat penting untuk keberhasilan perancangan program pemberian pinjaman berbasis kelompok dalam meningkatkan akses pendapatan kaum miskin atau kelompok low income. Modal sosial yang tercermin dalam aktivitas perkumpulan yang kuat diyakini sebagai alat yang efektif untuk mengurangi biaya transaksi dan menurunkan exposure terhadap berbagai risiko keuangan dalam hubungannya dengan pemberian pinjaman kepada masyarakat miskin. Di samping itu dapat meningkatkan kemampuan peminjam untuk berpartisipasi dalam transaksi kredit yang menyangkut persoalan ketidakpastian mengenai kepatuhan dan sejumlah hambatan finansial. Modal

sosial memainkan peran kunci yang memungkinkan rumah tangga memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dalam bentuk praktik dan pengembangan pengetahuan baru tentang teknologi, menghasilkan modal ekonomi dan sumber daya manusia serta membuat proses pembangunan berkelanjutan.

Jumlah Perempuan Rentan Miskin di Kota Bandung paling banyak diantara kota-kota lain di Jawa Barat (yang bukan daerah Kabupaten di Jawa Barat) selama kurun waktu 2007-2010 berdasarkan data dari Pusdalitbang Bappeda Provinsi Jawa Barat. Sudah ada program pembinaan terhadap PRSE di Kota Bandung namun jumlah PRSE yang dibina masih tergolong sangat sedikit dan terbatas yakni hanya dibatasi sebanyak 100 orang PRSE di satu kelurahan yang mendapat giliran pembinaan setiap tahunnya seperti pelatihan menjahit, dan lain-lain (Fajarina, 2018).

Perempuan Rentan Miskin dalam urusan domestik, harus menjadi sosok ibu yang penyayang dan pendidik bagi anak-anaknya. Selain itu peran kepala keluarga dan pencari nafkah utama harus bertanggung jawab dalam keluarganya baik dalam penyediaan keuangan, pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Keadaan ekonomi yang sulit, membuat perempuan Rentan Miskin sulit memenuhi kebutuhan dasar keluarga, terlebih lagi kebutuhan Pendidikan dan sarana kesehatan yang menjadi hal luar biasa bila keluarga perempuan awan sosial ekonomi ini dapat menjalankannya.

KOPMU DT terus bergerak memberdayakan perempuan Rentan Miskin hingga kini di Kota Bandung memiliki 256 anggota yang tersebar di beberapa Kecamatan pada tahun 2023, dengan salah satu tujuan Membentuk karakter Baik dan Kuat (BAKU) khas Daarut Tauhiid, Membentuk individu yang berdaya, tangguh akidah dan ekonominya, dan Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan usaha. Tentunya dalam Penelitian ini dilakukan tinjauan pada

penelitian terdahulu digunakan sebagai tolak ukur peneliti untuk menganalisis suatu penelitian. Terlampir sebagai berikut:

Table 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil penelitian	Perbedaan
1	Juli Astutik 2018	<i>The Model Of Social Support Of People In The Empowerment Of Youth As An Effort To Increase Social Function</i> DOI: 10.15408/empati	Kualitatif	Dukungan sosial teman sebaya dalam pemberdayaan remaja sebagai upaya meningkatkan keberfungsian sosial remaja korban penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Jabung Kabupaten Malang.	Meneliti dengan metode kualitatif menggunakan 3 variabel yang menghasilkan teori baru. Tiga variable tersebut adalah dukungan sosial, pemberdayaan dan keberfungsian sosial. Sementara penelitian yang akan dilakukan adalah dengan metode kuantitatif
2	Maria STOYKOV 2019	<i>Empowerment and Social Functioning of People with Mental Disabilities</i> Maria https://doi.org/10.26407/2021jrtd.1.43	Kualitatif	Pemberdayaan sebagai konstruksi “multikomponen” dan “multilevel” dihadirkan sebagai elemen utama dan alat yang berharga dalam proses pemberian dukungan dan pemulihan penyandang disabilitas mental. Hubungan yang diuraikan antara pemberdayaan dan fungsi individu dalam banyak kasus adalah dua sisi. Pemberdayaan didefinisikan sebagai pendekatan sentral dalam proses pemulihan dan dukungan orang dengan penyakit mental	Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan konsep hubungan pemberdayaan dan keberfungsian sosial disabilitas. Penelitian yang akan dijalani menggunakan metode kuantitatif deskriptif uji korelasi untuk menguji hubungan pemberdayaan dan keberfungsian sosial perempuan Rentan Miskin.
3	Liu, Conghui Wang 2021	<i>The Development of Social Function Questionnaire</i>	Kuantitatif	Berdasarkan analisis faktor eksplorasi dan konfirmatori dengan dua sampel, versi final <i>Social</i>	Mengukur keberfungsian sosial lansia menggunakan kuesioner, sementara pada rancangan

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil penelitian	Perbedaan
		<p><i>e for Chinese Older Adults</i></p> <p>doi: 10.3389/fpsyg.2022.794990</p>		<p><i>Function Questionnaire for Chinese Older Adults (SFQCOA)</i> berisi tiga dimensi dengan 12 item: dukungan sosial, adaptasi sosial, dan keterlibatan sosial. Uji validitas kriteria dengan sampel ketiga menunjukkan bahwa SFQCOA berhubungan positif dengan indeks sehat dan berhubungan negatif dengan indeks tidak sehat. Validitas dan reliabilitas kuesioner mencapai persyaratan standar psikometrik, menunjukkan bahwa ini adalah alat yang efektif untuk mengukur fungsi sosial orang dewasa yang lebih tua.</p>	<p>Penelitian yang dibuat oleh peneliti saat ini adalah mengukur hubungan pemberdayaan dan keberfungsian sosial dengan uji korelasi</p>
4	Wina Qurratu	<p>Pemberdayaan Perempuan Rentan Miskin (Prse) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2018 https://doi.org/10.37950/ijid.v3i1.83</p>	Kualitatif	<p>Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses pemberdayaan Perempuan Rentan Miskin (PRSE) dan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pemberdayaan perempuan Rentan Miskin di Kabupaten Bantul. Penelitian</p>	<p>Penelitian sebelumnya membahas tentang pemberdayaan di perempuan Rentan Miskin di Kabupaten Bantul, tanpa mengaitkan hubungannya dengan keberfungsian sosial. Pada penelitian berikutnya peneliti akan membahas pemberdayaan perempuan Rentan Miskin pada program koperasi pemberdayaan umat DT Peduli dan mencari hubungannya dengan keberfungsian sosial</p>

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil penelitian	Perbedaan
5	Dessy Fitri Pratiwi 2021	Keberfungsian Sosial Buruh Perempuan Pada Sektor Industri Dalam Keluarga DOI: https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13539	Kualitatif	Konflik yang dialami membuat keberfungsian sosial buruh perempuan belum dapat diciptakan, karena tidak sepenuhnya menjalankan peran sebagai isteri maupun ibu, sehingga mempengaruhi kualitas buruh perempuan sebagai individu yang baik. Oleh karena itu, perlu intervensi pekerja sosial dengan buruh perempuan sebagai klien serta menggunakan metode casework untuk mengembalikan dan menciptakan keberfungsian sosial individu.	Secara kualitatif penelitian terdahulu ini menunjukkan kurang baiknya keberfungsian sosial perempuan pekerja. Sementara penelitian yang akan dijalani adalah menjadikan keberfungsian sosial sebagai variable yang

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah pokok peneliti ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemberdayaan Perempuan Rentan Miskin melalui program koperasi pemberdayaan umat DT peduli ?
2. Bagaimana Keberfungsian Sosial Perempuan Rentan Miskin peserta koperasi pemberdayaan umat DT peduli?
3. Bagaimana Hubungan Antara pemberdayaan dengan keberfungsian Sosial Perempuan Rentan Miskin koperasi pemberdayaan umat DT peduli?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

1. Pemberdayaan Perempuan Rentan Miskin melalui program koperasi pemberdayaan umat DT peduli.
2. Keberfungsian Sosial Perempuan Rentan Miskin peserta koperasi pemberdayaan umat DT peduli.
3. Hubungan Antara pemberdayaan dengan keberfungsian Sosial Perempuan Rentan Miskin koperasi pemberdayaan umat DT peduli.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori-teori dan konsep-konsep Kesejahteraan Sosial yang berkaitan dengan Hubungan Pemberdayaan dan keberfungsian sosial perempuan Rentan Miskin
2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengetahui dan memahami tentang Hubungan Antara Pemberdayaan dengan keberfungsian sosial perempuan Rentan Miskin.